

1

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 11

TAHUN 2008

Tolak PLTN, Ribuan Warga Segel Kantor Batan

Jepara-Sekitar empat ribu warga Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berjalan kaki sekitar satu kilometer dari desanya untuk menyegel pintu gerbang Kantor Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) di Desa Balong, Kamis (28/2) siang.

Oleh
SU HERDJOKO

Keberadaan kantor itu adalah untuk persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Balong.

Masyarakat sudah melakukan unjuk rasa besar-besaran sebanyak empat kali sejak tahun 2007, dan hari ini menutup pintu gerbang kantor itu secara permanen dengan batu-bata dan semen besi beton setinggi satu meter.

Para pengunjung rasa itu terdiri dari lelaki, perempuan, anak-anak sampai kakek-nenek, berjalan kaki bersama-sama secara tertib.

Mereka mengenakan ikat kepala putih dengan tulisan PLTN. Selain itu mereka juga berkalung janur kuning sebagai simbol persatuan untuk menolak PLTN.

Kepala Desa Balong Suwanto dan perangkat desa lainnya juga ikut dalam unjuk rasa ini.

"Saya posisinya dalam hal ini di tengah. Saya akan mengikuti agenda rakyat asalkan mereka mematuhi aturan yang berlaku. Sejauh ini dalam beberapa kali unjuk rasa memang tidak ada tindakan anarkis," kata Suwanto.

Koordinator aksi, Firdaus Rahmadi, menjelaskan bahwa penolakan ini memang kehendak seluruh warga

Balong. "Bila PLTN dibangun di desa kami, jelas membahayakan jiwa kami semua. Keberadaan kantor Batan di sini menunjukkan bahwa pemerintah masih bersikeras membangun PLTN. Oleh karena itulah kami menyegel secara permanen kantor ini sebagai sikap keras kami menolak PLTN," lanjutnya.

Aksi ini juga dihadiri anggota DPR-RI dari Komisi IV Mufid A Busyairi. Ia berkommentar, sejauh ini anggota DPR terbagi menjadi dua, ada yang setuju dan ada yang menolak PLTN.

"Yang jelas, sejauh ini sudah ada beberapa fraksi yang menolak PLTN seperti PPP, Golkar PDIP, Partai Demokrat dan PKB anggota DPR yang memenangkan suara dari daerah pemilihan suara. Fraksi-fraksi lainnya kami belum tahu."

Saat ini proses penyegelan sedang berlangsung, truk pengangkut batu-bata semen besi pasir sudah menurunkan muatannya dan tukang beton mulai memasang beton di pintu gerbang disaksikan ribuan masyarakat. ■

1

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 11

TAHUN 2008

Empat Bank Membiayai Tiga Pembangkit

Total kebutuhan pinjaman ketiga PLTU Rp 3,4 Triliun

**Fransisca Yuli Astuti,
Novrida Manurung**

JAKARTA. Setelah melewati penantian yang cukup lama, empat bank besar akhirnya menyatakan komitmen untuk menyalurkan kredit ke proyek pembangkit listrik. Keempat bank yang akan bersindikasi itu adalah PT Bank Mandiri Tbk., PT BNI Tbk., PT BRI Tbk. dan PT BCA Tbk. Mereka akan membiayai pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN yang berlokasi di Indramayu, Rembang dan Labuhan.

"Penandatanganan kredit sindikasi ini akan berlangsung sekitar awal hingga pertengahan Maret 2008. Rencananya, BCA akan mengucurkan kredit sebesar Rp 1,1 triliun untuk seluruh proyek," kata Managing Director PT BCA Tbk. Dahlia Ariotedjo.

Keempat bank yang bergabung dalam sindikasi berbagi tugas sebagai koordinator. Untuk pembangkit listrik yang berlokasi di Rembang, yang akan menjadi koordinator kreditur adalah Bank Mandiri. BCA menjadi koordinator kreditur untuk pembangunan *power plant* di Labuhan. Sedangkan BNI akan menjadi koordinator pemberi utang untuk pembangunan pembangkit di Indramayu.

Adapun nilai kredit untuk ma-

berbeda. Untuk pembangunan di Labuhan dan Rembang masing-masing akan mengucur kredit sindikasi sebesar Rp 1,1 triliun. Sedangkan untuk pembangunan di Indramayu akan mengalir kredit sebesar Rp 1,2 triliun.

**Mandiri menyiapkan
Rp 1,2 triliun**

Group Head Bank Mandiri Supriyusman menuturkan, perusahaannya sedang menghitung-

**Kendati hanya
sebagai pengikut,
namun BRI telah
menyiapkan
pinjaman senilai
Rp 1 triliun.**

hitung penyaluran kredit ke tiap-tiap proyek. Mandiri sudah menyiapkan dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk kredit pembangunan ketiga pembangkit itu. "Bank Mandiri akan menjadi salah satu koordinator. Kalau terwujud, maka ini penandatanganan kredit kedua dalam tahun ini. Sebelumnya kami memberikan kredit untuk *power plant* Bukit Asam senilai Rp 1,64 triliun,"

Untuk BRI, yang selama ini terkenal sebagai bank yang fokus ke segmen usaha mikro kecil dan menengah, keikutsertaan dalam sindikasi kreditor pembangkit listrik tak lepas dari upaya BRI memperbesar porsi kredit korporat. Tahun lalu, BRI sudah terlibat dalam pembiayaan berbagai proyek besar. Kendati tak menjadi koordinator di satu proyek pembangkit pun, tak berarti dana yang dialokasikan BRI untuk proyek ini kecil.

BRI telah mengalokasikan Rp 1 triliun untuk membiayai ketiga proyek pembangkit listrik. "Kami hanya sebagai anggota saja. Untuk setiap pembangkit, kami akan berperan serta mengucurkan kredit sekitar Rp 300 miliar-Rp 400 miliar saja," kata Direktur Bisnis Umum BRI Sudaryanto Sudargo.

Ketiga pembangkit listrik yang dibiayai oleh keempat bank, masuk dalam kelompok pembangkit *crash program* 10.000 Mega Watt. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla meluncurkan agenda percepatan pembangunan sejumlah PLTU untuk mengurangi beban subsidi. Saat ini, hampir separuh listrik yang diproduksi menggunakan solar dan minyak tanah sebagai bahan bakar. Sementara PLTU tersebut memakai batu-bara, yang harganya lebih mu-

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

Kepulauan Seribu Dapat Aliran Listrik

MESKI sudah 63 tahun Indonesia merdeka, masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI baru menikmati listrik tahun ini. Gubernur DKI Fauzi Bowo, menurut rencana, meresmikan pemanfaatan listrik di kabupaten yang membawahi enam kelurahan itu pada 13 Maret. Bupati Kepulauan Seribu Djoko Ramadhan mengatakan hal itu di Balai Kota, kemarin, sebelum bertemu dengan Gubernur DKI. Aliran listrik proyek PT PLN yang menggunakan jaringan kabel bawah laut berkekuatan 3 megawatt itu untuk kali pertama menerangi tiga kelurahan, Kelurahan Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, dan Pulau Pari. "(Listrik berkekuatan) 3 megawatt belum mampu menerangi sampai ke Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Panggang wilayah bagian utara kabupaten itu," kata Djoko. Aliran listrik baru itu untuk menerangi bangunan dan lapangan terbang di Pulau Panjang dengan panjang *runway* 1,4 km untuk pesawat jenis Foker 50 berkapasitas 50 tempat duduk. (Ssr/BT/J-3)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 **29** 30 31

HALAMAN : 8.2

TAHUN 2008

Pengusaha Minta Kepastian Energi

JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak Departemen Perindustrian memiliki akses atas distribusi energi. Akses itu diharapkan mampu menjawab kebutuhan industri akan sumber energi. "Kami sudah capek, setiap janji Menteri Perindustrian memenuhi kebutuhan energi selalu gagal," ujar anggota Kadin, Ahmad Safiun, kepada *Tempo* kemarin.

Dia menuturkan setiap pelaku industri mengeluhkan berbagai persoalan energi kepada pemerintah selalu tak membuahkan hasil. Alasannya, pihak pengambil keputusan distribusi energi ada pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selama ini, kata Ahmad, persoalan energi menjadi momok buat industri. Kebutuhan energi, seperti listrik dan gas alam, selalu menemui masalah. Terakhir, industri menderita kerugian atas pemadaman listrik di wilayah Jawa-Bali.

Menurut dia, persoalan distribusi energi merupakan persoalan koordinasi pemerintah. Puncak pengambilan keputusan energi, ujar Ahmad, seharusnya ada di tangan pemimpin para menter-

ri. "Pemerintah jangan hanya omong kosong, industri tidak akan ada tanpa energi," katanya.

Pemadaman listrik yang terjadi pekan lalu dikecam kalangan pengusaha. Pemadaman tersebut menurunkan produktivitas pabrik dan menelan biaya yang tak sedikit.

Sebelumnya, pengusaha komponen mobil, Benny Kusbini, mengatakan, dengan adanya pemadaman listrik, ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan. "Untuk tetap melanjutkan proses produksi, setidaknya diperlukan 50-100 liter solar per jam," ujarnya.

Beban biaya tersebut belum memasukkan biaya genset, yang dibeli seharga Rp 500 juta. Ahmad mengatakan, akibat ketidakpastian pasokan listrik, semua industri menengah mempersiapkan genset. Harga paling murah genset saat ini sebesar Rp 4 juta.

Pada tahun lalu industri sarung tangan dan karet kesulitan mendapatkan pasokan gas alam. Kedua industri itu membutuhkan tekanan gas alam yang tinggi. Ketiadaan gas membuat sebagian industri menggantinya dengan batu bara. ● YULIAWATI

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

■ PASOKAN BATUBARA PLN

Armada Asing Boleh Angkut Batubara PLN

JAKARTA. PLN kini bisa bernafas lega. Pemerintah telah mengizinkan perusahaan setrum pelat merah itu menggunakan armada asing untuk mengangkut batubara untuk mengatasi leletnya pasokan. Beberapa waktu lalu, akibat terbatasnya pasokan batubara ke sejumlah pembangkit PLN, sempat terjadi krisis listrik di daerah Jawa dan Bali.

"Kami sudah mendapat izin yang berlaku sampai 1 Januari 2010 dari Direktur Jenderal Perhubungan laut dan Menko Perencanaan," ungkap Direktur Utama PLN Eddie Widiono di Jakarta, Kamis (28/2). Namun Eddie belum memastikan akan memakai berapa kapal asing untuk angkutan batubaranya nanti.

Selama ini, PLN mengeluhkan keterbatasan angkutan akibat adanya aturan yang hanya membolehkan kapal berbendera merah putih untuk mengangkut batubara. Jumlah kapal yang beroperasi pun terbatas, hanya sekitar sembilan kapal. Padahal

kebutuhan minimal untuk transportasi batubara itu paling sedikit 15 kapal.

Nah, khusus untuk proyek pembangkit 10.000 MW, PLN memprediksi butuh kapal sekitar lima sampai enam kapal. Dan kesemuanya sudah tentu harus berbendera merah putih. Peralnya, kemungkinan pada tahun 2010 saat izin menggunakan kapal berbendera mancanegara usai, proyek setrum 10.000 MW itu baru selesai.

Makanya, saat ini PLN tengah sibuk mengusahakan untuk menambah armada kapal berbendera Indonesia. "Harus cepat-cepat. PLN membantu siapapun, apakah itu swasta atau BUMN, untuk pengadaan kapal berbendera Indonesia," kata Eddie.

Memang ada opsi pembelian kapal. Namun, hal tersebut tidaklah semudah membalik telapak tangan. "Lihat perkembangan nanti, regulator bilang apa tentang itu," jelas Eddie.

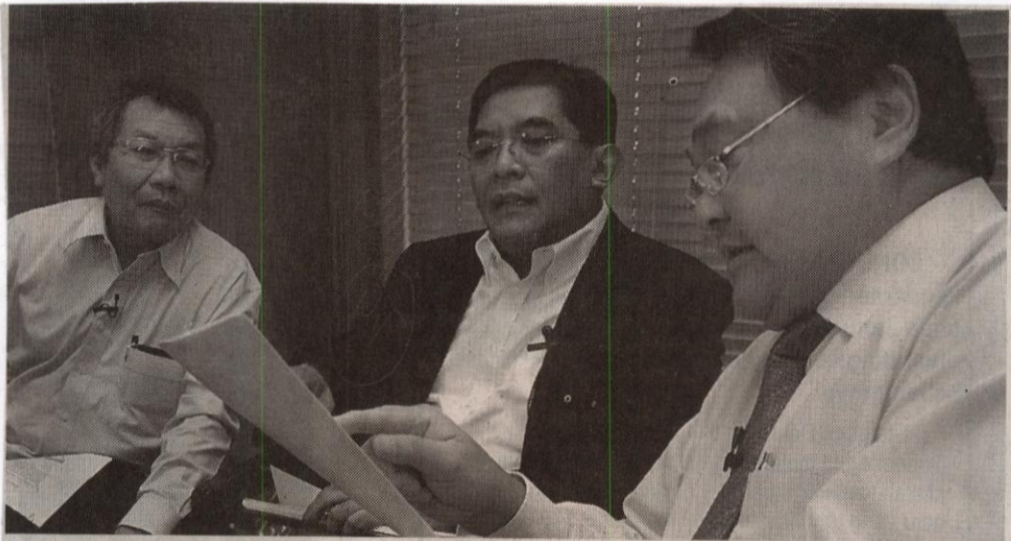
Ruisa Khoiriyah

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/> O
--	--

KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 HALAMAN: T.4 TAHUN 2008



BISNIS/KELIK TARYONO

PASOKAN BATU BARA: Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral Simon Felix Sembiring (*kiri*) dan Dirut PLN Eddie Widiono berbicara dengan Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Oentoro Surya (*kanan*) menjelang acara diskusi di Jakarta kemarin. Diskusi tersebut bertema *Mengurai Benang Kusut Suplai Batu bara ke PLTU.*

6

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

● BISNIS INDONESIA
○ INVESTOR DAILY
○ KOMPAS
○ KORAN TEMPO
○ KORAN KONTAN
○ MEDIA INDONESIA
○ NERACA
○ PIKIRAN RAKYAT
○ RAKYAT MERDEKA
○ REPUBLIKA

○ SUARA KARYA
○ SEPUTAR INDONESIA
○ SUARA PEMBARUAN
○ SINAR HARAPAN
○ TABLOID KONTAN
○ THE JAKARTA POST
○ MAJALAH GATRA
○ MAJALAH TEMPO
○ MAJALAH TRUST
○

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7-4

TAHUN 2008

Pembangkit hidro Jatim terhambat kredit bank

BISNIS INDONESIA

SURABAYA: Perluasan pengoperasian pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Jawa Timur terkendala alotnya pengucuran kredit bank untuk sektor usaha tersebut di tengah besarnya kebutuhan daya listrik di desa terpencil.

General Manager PT PLN Distribusi Jatim Hariadi Sadono mengatakan ketersediaan air untuk menggerakkan PLTMH di Jatim bagian selatan cukup potensial, sehingga kawasan itu layak didirikan sejumlah pembangkit mikro hidro guna memberi aliran listrik dusun-dusun yang belum terjangkau PLN.

Menurut dia, peluang tersebut layak dimanfaatkan swasta, dan PLN akan membeli produksi listriknya dengan harga hingga Rp700/kWh. Jangka pembangunan PLTMH disebutkan hanya enam bulan.

"Berdasarkan kelayakan usaha, pembangunan PLTMH dapat kembali modal (BEP) da-

lam jangka lima tahun. Apalagi, PLN pasti membeli daya listriknya. Persoalannya, swasta umumnya terkendala alotnya kucuran dana bank," ujarnya, kemarin.

Program kemitraan

Hariadi menambahkan PLN Distribusi Jatim bisa memanfaatkan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) guna membantu pengusaha kecil dalam membangun PLTMH berkapasitas hingga 25 kVA yang hanya butuh beberapa ratus juta rupiah.

PLN Distribusi Jatim sejak beberapa tahun terakhir diketahui telah membeli daya listrik PLTMH Kalimantan berkapasitas 25 kVA yang dibangun pengusaha kecil yakni Paguyuban PLTMH Seloliman, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto. Produksi listriknya telah didistribusikan kepada penduduk di beberapa dusun di kawasan tersebut.

Ketua Paguyuban PLTMH Seloliman, Suroso, mengatakan pihaknya kini tengah membangun PLTMH tahap II bernama PLTMH Wot Lemah berkapasitas 20 kVA dengan investasi Rp475 juta, diantaranya memanfaatkan dana PKBL PT PLN Jatim Rp100 juta dan sisanya mengupayakan dari donatur asing yakni Global Environmental Funding (GEF) lembaga di bawah PBB.

"Kami telah menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) dengan PLN Jatim. Harga ditawarkan Rp735 per kWh. Kami masih menunggu persetujuan Dirut PT PLN untuk penandatanganan kontrak jual-beli," tuturnya.

Sebelumnya, Paguyuban PLTMH Seloliman menjual daya listrik ke PLN seharga Rp533 per kWh melalui pengoperasian PLTMH Kalimantan, sementara PLN menjual ke pelanggan rumah tangga seharga Rp495 per kWh. (K22)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29) 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2008

PLN Kontrak Angkutan Batu Bara Rp3,3T

JAKARTA (SINDO) - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) menggandeng PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (Arpeni) untuk pengangkutan batu bara selama 15 tahun dengan nilai kontrak Rp3,3 triliun. Kontrak dibuat untuk menjamin ketersediaan suplai batu bara bagi pembangkit PLN.

"Dengan kontrak tersebut, kita akan melayani pengangkutan batu bara langsung ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tanjung Jati B. Kapal yang dikontrak berjumlah dua buah," ujar Direktur Utama Arpeni Oentoro Surya di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, kapal yang dikontrak PLN memiliki daya angkut 66.000 ton per kapal dan dalam setahun dapat mengangkut 4.200.000 ton ba-

tu bara. Alat angkut batu bara yang dibutuhkan PLN untuk seluruh pembangkitnya dan pembangkit-pembangkit dalam program 10.000 MW adalah 7-8 unit kapal jenis panamax, 5 unit kapal jenis handy-max, 1 unit jenis handsized-25.000, 1 unit handsized 10.000, dan 157 unit tongkang (*barge*). Sementara kapal berbendera Indonesia yang telah siap melayani kebutuhan PLN saat ini, antara lain 8 unit jenis panamax, 1 unit jenis handy-max, 1 unit handsized 25.000, 1 unit handsized 10.000, dan lebih dari 500 unit tongkang.

Sementara itu, terkait masalah kekurangan suplai batu bara yang dialami pembangkit-pembangkit PLN akhir-akhir ini, Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono mengatakan bahwa hal itu jelas karena ketidaksiapan infrastruktur. Sebab, tegas dia, stok batu bara di dalam negeri dapat mencukupi kebutuhan. "Masalah ini merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama," imbuhnya.

(ferial thalib)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Program Insentif-Disinsentif untuk Paksa Pelanggan Hemat Listrik Boros Didenda 60%

JAKARTA (MI): Program insentif akan mengenakan diskon 20% bagi pelanggan yang bisa berhemat dan disinsentif atau denda 60% bagi pelanggan yang boros. Kebijakan itu untuk memaksa pelanggan berhemat.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono menjelaskan hal itu kemarin di Jakarta. "Jadi itu semacam ancaman saja, agar masyarakat berhemat. Dan mulai berlaku Maret 2008," kata Purwono.

Sebelumnya, pemerintah berniat memberlakukan program insentif-disinsentif dengan target menekan 20% rata-rata konsumsi listrik tahun lalu. Jadi pelanggan yang bisa menghemat listrik minimal 20% akan mendapat insentif berupa pengurangan tarif sebesar 20%. Sebaliknya yang tidak bisa menekan konsumsinya minimal 20% akan terkena disinsentif sebesar 60%.

Insentif maupun disinsentif dikenakan pada selisih realisasi konsumsi listrik dengan rata-rata yang ditetapkan pemerintah berdasarkan data tahun lalu. Berdasarkan data PLN, total pelanggan listrik rumah tangga mencapai 34,104 juta. Namun sebanyak 30,922 juta atau 90,67% di antaranya biasa mengonsumsi listrik di atas batas penghematan 20% yang ditentukan.

Sementara itu hanya 3,182 juta pelanggan rumah tangga atau 9,33% yang mungkin mendapat insentif berupa pengurangan biaya rekening listrik. Dari semua pelanggan itu, sekitar 23,231 juta pelanggan berada di sistem ke-

listrikan Jawa dan Bali. Hanya 12.116 pelanggan rumah tangga atau sekitar 0,1% yang mungkin mendapat insentif. Pelanggan rumah tangga tersebut merupakan golongan R2 (2.200-6.600 VA) dan R3 (6.600 VA) di Jawa-Bali.

Adapun pelanggan rumah tangga kelas R1 dari 450 VA sampai 2.200 VA di data tersebut akan terkena tarif lebih mahal daripada sebelumnya. Untuk wilayah di luar Jawa dan Bali, dari 10,873 juta pelanggan rumah tangga, sebanyak 3,16 juta atau 29,1% berpotensi mendapatkan pengurangan biaya rekening.

Lebih khusus lagi, hampir seluruh pelanggan di semua golongan wilayah distribusi Nusa Tenggara Timur berpotensi mendapat insentif tarif.

Bukan kenaikan

Menurut Purwono, program insentif dan disinsentif bukan merupakan bentuk lain kenaikan ta-

rif listrik. Sebab, tambahan rekening listrik hanya dikenakan pada pelanggan yang boros. Bagi pelanggan yang berhemat malah mendapat pengurangan tarif. "Artinya, pemerintah memberikan pilihan. Sementara, kalau kenaikan tarif, pelanggan tidak punya pilihan, mau hemat atau boros tetap tarifnya naik," katanya.

Purwono mengatakan pemerintah tidak perlu meminta persetujuan DPR untuk melaksanakan program insentif dan disinsentif. Keputusan program ini akan dikeluarkan direksi PLN.

Ia juga mengatakan, program sudah disiapkan sejak dua tahun lalu dan pemerintah sudah mengantisipasi dampak sosialnya. Pemerintah akan menerapkan program penghematan pemakaian listrik melalui penenaan tarif insentif dan disinsentif pada rekening pelanggan bulan Maret yang ditagih April 2008. (Pia/E-2)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

LISTRIK SWASTA

Warga Batam Harapkan Pelayanan Listrik Ditangani Pemerintah

BATAM (Suara Karya): Warga Batam mengharapkan pelayanan listrik di wilayah itu dilakukan langsung oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pasalnya, pelayanan yang dilakukan pihak swasta saat ini sering mengecewakan.

Pihak swasta yang dimaksud adalah PT Pelayanan Listrik Nasional yang bila disingkat juga menjadi PLN atau dikenal dengan PLN Batam.

Meski membayar tarif listrik lebih mahal dari daerah-daerah lain di Indonesia, masyarakat Kota Batam tetap saja tidak memperoleh pelayanan maksimal dalam memenuhi kebutuhan sumber energi tersebut.

Pemutusan listrik sepihak, bahkan bersifat mendadak atau lebih dikenal dengan istilah pemadaman bergilir, masih menjadi kondisi rutin yang harus dirasakan oleh masyarakat Batam. Dengan alasan keterbatasan pasokan energi dari pihak ketiga (PT Dalle Energi) yang juga perusahaan swasta, PT PLN Batam dengan terpaksa melakukan pemadaman bergilir secara rutin, untuk menghindari beban puncak.

Dengan status PT PLN Batam sebagai perusahaan swasta, masyarakat Batam terpaksa harus membayar tarif lebih mahal karena tidak memperoleh anggaran subsidi energi dari pemerintah pusat.

"Melihat kondisi ini, sebaiknya pengelolaan listrik di Batam ditangani oleh pemerintah saja. Sebab, masyarakat Batam pun berhak memperoleh subsidi dari pemerintah," demikian bunyi kutipan siaran pers yang dilayangkan Gerakan Mahasiswa Kosgoro Batam yang diterima *Suara Karya*.

Keluhan senada dilayangkan Ketua Badan Eksekutif

Mahasiswa (BEM) Unrika Batam, Rahmat Riayandi. Menurut Rahmat, listrik merupakan kategori kebutuhan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya, sebaiknya berada dalam penguasaan dan pengelolaan negara. Hal itu untuk menghindari perlakuan semena-mena pihak swasta yang mengelolanya.

Protes lain terhadap PT PLN Batam juga dilontarkan oleh Lembaga Perlindungan Hak-hak Konsumen (LPHK) Batam. Koordinator Bidang Energi LPHK Ikhsan mengatakan, sebenarnya warga Batam selama ini tergolong konsumen yang tidak banyak menuntut. Kendatipun tidak memperoleh subsidi dari pemerintah dan membayar tarif listrik lebih mahal dari daerah lain di Indonesia, warga menerima saja berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh PT PLN Batam.

Namun, setelah merasakan kualitas pelayanan PT PLN Batam yang dari hari ke hari tidak menjadi lebih baik, warga Batam selaku konsumen listrik mulai mempertanyakan keberadaan pihak swasta selaku pengelola kelistrikan di Batam. "Kalau pengelolaannya tidak lebih profesional dan memberikan nilai tambah bagi warga Batam, kenapa tidak pemerintah saja yang mengelola. Paling tidak, konsumen Batam tidak mesti membayar lebih mahal untuk memperoleh kebutuhan listriknya," kata Ikhsan.

Keluhan lebih keras lagi datang dari sejumlah pelaku usaha di Batam. Mereka menilai kondisi pelayanan yang diberikan PT PLN Batam sangat kurang mendukung kelangsungan usaha mereka. Beberapa pengusaha pengelola warung internet (Warnet) dan warung

telekomunikasi (wartel) sangat merasakan dampak langsung dari pemadaman listrik rutin yang dilakukan PT PLN Batam.

Zuraida, seorang pengelola beberapa warnet, bahkan menilai PT PLN Batam seharusnya memberi kompensasi kepada pelaku usaha yang merasa dirugikan atas pelayanan buruk perusahaan tersebut. Karena, selain bisa merusak perangkat elektronik seperti komputer, pemutusan aliran listrik PT PLN Batam yang berlangsung berjam-jam juga berdampak buruk pada keseimbangan *cash flow* usaha yang ia kelola. "Bagaimana tidak, walaupun listrik mati, biaya berlangganan jaringan internet ke Telkom tetap jalan, karyawan juga tetap harus digaji yang bukan berdasar pada hidup-matinya aliran listrik," ujar pemilik Smart Net itu.

Sementara itu, menanggapi berbagai keluhan warga Batam tersebut, pihak PT PLN Batam tampaknya tidak terlalu merisaukannya, dengan dalih telah melakukan upaya optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi konsumen. Saat dimintai konfirmasi, Direktur Teknik PT PLN Batam Imam, Rani meminta *Suara Karya* menghubungi Humas PT PLN Batam, Ade Sulistiani.

Namun Ade sendiri terkesan menghindari dari beberapa hal yang dikonfirmasi kepadanya. Sebelum percakapan selesai, Ade telah menutup hubungan komunikasi melalui telepon yang dilakukan *Suara Karya* dengannya.

Sebelum menutup telepon, Ade sempat membantah jika kualitas pelayanan PT PLN Batam tidak optimal. Sebab, kata Ade, PT PLN Batam telah menetapkan tingkat mutu pelayanan (TMP) pelanggan.

(Gunawan Satary)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 23

TAHUN 2008

Ribuan Warga Blokade Gerbang Kantor Batan

JEPARA(MI): Ribuan warga Desa Balongan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng), berunjuk rasa dengan mendirikan tembok setinggi 3 m menutup pintu gerbang kantor Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) setempat, kemarin.

Aksi dilakukan warga sebagai wujud penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di kawasan Gunung Muria, Jepara.

Warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat dan Mahasiswa Balongan (Kraton) itu telah berdatangan dan berkumpul di Simpang Lima Desa Balongan sejak pukul 08.00 WIB.

Sekitar 2 jam kemudian, ribuan warga yang terdiri dari lelaki, perempuan serta anak-anak berjalan sejauh 1 km mendatangi kantor Batan di tepi pantai semenanjung Muria.

Sebelumnya, warga berhenti di Kantor Balai Desa Balongan dan mengajak seluruh aparat desa bersama-sama ke kantor Batan. Setibanya di depan kantor Batan, warga bergotong-royong mendirikan tembok yang terbuat dari batako dan semen menutup pintu gerbang.

Selain itu, warga berorasi meminta pembangunan PLTN

► 'Aksi dilakukan warga sebagai wujud penolakan terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di kawasan Gunung Muria, Jepara.'

dihentikan segera.

Juru Bicara Kraton Muhammad Firdaus Rahmadi mengatakan aksi itu juga dalam rangka memperingati hari nuklir dan meminta pemerintah mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 10/1997 tentang Ketenaganukliran karena pembuatan UU tersebut tidak mencerminkan dan melibatkan masyarakat.

Sementara itu, sistem pemadaman bergilir akan dilakukan di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), pada pertengahan bulan ini oleh PLN Persero Wilayah IX Sulsel, Sultra, dan Sulbar.

Pemadaman bergilir terkait dengan akan dilakukannya pemeliharaan dan perbaikan salah satu unit turbin air milik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru yang menghasilkan daya 63 Mw dari daya total yang dihasilkan PLTA Bakaru sebesar 117 Mw.

"Pemeliharaan dan perbaikan tersebut harusnya sudah dilakukan akhir 2007 lalu, namun masih bisa ditunda karena banyaknya kegiatan yang butuh listrik. Kali ini hal itu tidak dapat ditunda lagi sebab risikonya sangat besar dengan terjadinya kerusakan permanen pada turbin tersebut," papar Kepala Humas PT PLN Wilayah IX Muhammad Yamin, kemarin. (AS/HT/LN/N-3)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29/30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

PLN Diizinkan Gunakan Kapal Batu Bara Asing

JAKARTA — Departemen Perhubungan (Dephub) memberi izin penggunaan kapal pengangkut batu bara berbendera asing oleh PLN hingga 1 Januari 2010 mendatang.

Dirjen Perhubungan Laut Dephub Effendi Batubara, menuturkan hal tersebut di Jakarta, Kamis (28/2). "Kita sudah informasikan mereka (PLN, red) boleh menggunakan kapal berbendera asing sampai batas waktu 1 Januari 2010. Selanjutnya harus pakai kapal berbendera Indonesia," ujarnya.

Untuk bisa menggunakan kapal berbendera asing ini, lanjut Effendi, BUMN sektor kelistrikan ini tidak perlu mengajukan perizinan khusus kepada Dephub. "Prosedurnya sama dengan kalau mereka gunakan kapal berbendera Indonesia," tandasnya.

Ditemui terpisah, Dirut PLN Eddie Widiono menuturkan pihaknya belum mendapat pemberitahuan resmi soal diperbolehkannya PLN menggunakan kapal pengangkut batu bara berbendera asing. "Alhamdulillah kalau memang sudah ada izinnya," katanya.

Agar pasokan batu bara bagi sejumlah pembangkit PLN di masa mendatang tidak lagi mengalami gangguan, menurut Eddie, pihaknya akan merubah pola kontrak pengangkutan batu bara dari sebelumnya menggunakan CNF (*cost and freight*) menjadi FOB (*free on board*).

Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan batu bara bagi PLTU 10 ribu megawatt (MW) yang akan mulai beroperasi pada 2010 mendatang, tambah Eddie, PLN membutuhkan tambahan kapal pengangkut berkisar 5-6 kapal. Sedangkan untuk PLTU yang sudah beroperasi saat ini, sambung dia, dibutuhkan sedikitnya 8 kapal.

"Permasalahan membeli kapal gampang saja, PLN bisa bantu. Tapi

bagaimana situasi pasar pengangkutan *bulk* (curah) dalam negeri saat ini, itu yang menjadi pertimbangan kita," tandasnya.

AS tetapkan 16 pelabuhan

Sementara itu, pihak otoritas pelabuhan Amerika Serikat (AS), United States Coast Guard (USCG), menetapkan 16 fasilitas pelabuhan di Indonesia telah memenuhi standar pengamanan internasional (International Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code).

Dari 16 fasilitas pelabuhan tersebut termasuk di dalamnya 9 pelabuhan khusus. Enam belas pelabuhan itu adalah PT Terminal Peti Kemas Surabaya, Pelabuhan Banjarmasin, PT Pertamina UPMS III Jakarta, PT Pertamina UP V Balikpapan, Senipah Terminal Total E&P Indonesia Balikpapan, PT Caltex Oil Terminal Dumai, Terminal Konvensional PT Pelindo II Jakarta, Jakarta International Container Terminal (JICT).

Pelabuhan lainnya adalah PT Pulp Kaltim Bontang, PT Badak Bontang, PT Indominco Mandiri Bontang, Pertamina UP II Dumai, PT Pelindo I cabang Dumai, Semarang International Container Terminal, Terminal Multi-Purpose Belawan, dan PT Multimas Nabati Asahan.

Dengan penetapan tersebut, menurut Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Effendi Batubara, maka kapal-kapal yang berangkat dari ke-16 fasilitas pelabuhan tersebut diizinkan untuk langsung menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di AS. "Kita harapkan para pengguna jasa pelabuhan, terutama para eksportir maupun importir untuk memanfaatkan fasilitas pelabuhan tersebut," paparnya. ■ dia

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

Pemerintah Paksa Pelanggan Listrik Berhemat

Pemerintah memaksa pelanggan untuk melakukan penghematan.

JAKARTA — Pemerintah menyatakan, program insentif dan disinsentif merupakan upaya memaksa pelanggan menghemat pemakaian listriknya. Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM, J Purwono, mengatakan, pemerintah melihat pemakaian listrik pelanggan sudah terlalu boros. "Kami memang memaksa pelanggan berhemat sebab pemakaian listrik sudah terlalu boros," katanya di Jakarta, Kamis (28/2).

Menurutnya, program insentif dan disinsentif bukan merupakan bentuk lain kenaikan tarif listrik. Sebab, tambahan rekening listrik hanya dikenakan pada pelanggan yang boros.

Lebih dari 90 persen pelanggan listrik golongan rumah tangga berpotensi terkena disinsentif berupa tambahan biaya rekening dalam program penghematan listrik yang direncanakan mulai Maret 2008. Data PT PLN yang diperoleh di Jakarta, Kamis menunjukkan, dari total pelanggan listrik rumah tangga sebesar 34,104 juta, sebanyak 30,922 juta atau 90,67 persen di antaranya mengkonsumsi listrik di atas batas terendah tidak terkena disinsentif yakni 80 persen rata-rata pemakaian listrik nasional.

Menurut data tersebut hanya sebanyak 3,182 juta pelanggan rumah tangga atau 9,33 persen yang kemungkinan mendapat insentif berupa pengurangan biaya rekening listrik. Data tersebut juga menunjukkan, dari 23,231 juta pelanggan di sistem kelistrikan Jawa dan Bali, hanya 12.116 atau 0,1 persen pelanggan rumah tangga yang ke-

mungkinan mendapat insentif. Pelanggan rumah tangga tersebut merupakan golongan R2 (>2.200-6.600 VA) dan R3 (>6.600 VA) di Jawa-Bali.

Sedangkan, pelanggan rumah tangga kelas R1 dari 450 VA sampai 2.200 VA di data tersebut akan terkena tarif lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Untuk wilayah di luar Jawa dan Bali, dari 10,873 juta pelanggan rumah tangga, sebanyak 3,16 juta atau 29,1 persen berpotensi mendapatkan pengurangan biaya rekening. Lebih khusus lagi, hampir seluruh pelanggan di semua golongan wilayah distribusi Nusa Tenggara Timur berpotensi mendapat insentif tarif.

Pemerintah akan menerapkan program penghematan pemakaian listrik melalui penerapan tarif insentif dan disinsentif pada rekening pelanggan bulan Maret yang ditagihkan April 2008. Melalui skema tersebut, pelanggan akan mendapat insentif apabila berhemat sama atau lebih besar dari 20 persen dari pemakaian listrik nasional tahun 2007.

Namun, jika pelanggan menggunakan listrik lebih dari 80 persen rata-rata nasional, maka akan dikenakan tarif disinsentif. Formula pemberian insentif adalah 20 persen dikalikan selisih pemakaian rata-rata nasional dengan pemakaian pelanggan dikalikan tarif listrik. ■ ant/dia

Fakta Angka

90,67 Persen

Pelanggan listrik golongan rumah tangga yang mengkonsumsi listrik di atas batas terendah tidak terkena disinsentif.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2008

Lelang Tender BBM

PLN Kebiri Pertamina

[JAKARTA] Lelang tender BBM sebanyak 1 juta kiloliter oleh PLN sebagai bentuk pengelibatan BUMN sebagai perusahaan publik. "Lelang yang dimenangkan Shell dan Aneka Kimia Raya bertujuan mencari harga termurah. Selama ini pasokan BBM untuk PLN berasal dari Pertamina," kata Sekretaris Jenderal Komite Independen untuk Pengawasan dan Penghematan Energi, Sofyano Zakaria saat dihubungi *SP*, Kamis (28/2).

Dikatakan, liberalisasi sektor publik ini sangat berbahaya. "Cabang-cabang produksi yang bersentuhan dengan publik dikuasai oleh swasta. Bagaimana keadaan republik ini jika suatu saat swasta atau asing ini bermasalah dengan pemerintah hingga menghentikan suplai BBM kepada masyarakat? Ini menyangkut nasionalisme yang rasional. Jika ingin bersaing, bersainglah yang adil," papar Sofyano.

Perihal keadilan, Sofyano menyatakan, apakah swasta atau asing ini diberlakukan pajak yang sama dengan Pertamina. Pajak itu

antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Impor sebesar 2,5 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, serta Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,3 persen. Pajak itulah yang dibebankan kepada Pertamina, sehingga BBM Pertamina lebih mahal dibanding swasta atau asing.

"Itulah penyebab kalahnya Pertamina dalam lelang tender. PLN sendiri berutang kepada Pertamina sebesar Rp 19 triliun. Apakah swasta memberikan ruang yang sama dengan Pertamina untuk memberikan utang kepada PLN? Apa PLN tidak malu sudah berutang ke Pertamina tapi membeli BBM ke swasta atau asing?," katanya.

PLN selama ini dapat meminta Pertamina mengirim BBM kapan pun. "Apakah swasta siap dengan kondisi demikian dan melakukan hal yang sama dengan Pertamina?" papar Sofyano.

Sependapat dengan Sofyano, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Ugan Gandar mengatakan, pemberlakuan pa-

jak antara swasta atau asing dengan Pertamina harus sama. Penyebabnya, Pertamina dengan swasta atau asing adalah PT.

Menurutnya, selama ini kerja sama antara PLN dan Pertamina berjalan baik. Pertamina tidak

*D*engan tender BBM, listrik dapat dijangkau lebih murah oleh masyarakat. Bagaimanapun kepentingan masyarakat harus didahulukan

mempermasalahkan utang PLN padanya.

Ia menduga, ini adalah kepentingan pihak tertentu. Untuk itu, dibutuhkan proteksi dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM (*security of supply*). Sebab, ketika migas mengalami

gangguan, hal itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan di negeri ini.

"Selama ini, Pertamina memasok BBM ke PLN. Lelang tender BBM ini membuat pasokan BBM dari Pertamina ke PLN berkurang. Akan diserahkan ke mana impor BBM Pertamina ini?" kata Ugan.

Sesuatu yang Baik

Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi VII DPR, Zaenal Arifin menanggapi tender BBM oleh PLN sebagai sesuatu yang baik. "Dengan cara itu, listrik dapat dijangkau lebih murah oleh masyarakat. Bagaimanapun kepentingan masyarakat harus didahulukan," ujar Zaenal kepada *SP*, Rabu (27/2).

Ia melanjutkan, Pertamina harus memanfaatkan dan memaksimalkan aset yang dimilikinya dengan baik. Hal itu semakin dipermudah dengan *captive market* dan subsidi yang diterima Pertamina.

Sementara itu, Direktur Institute for Essential Services Reform, Fabby Tuniwa berpendapat, keka-

lahan Pertamina lebih karena MOPS dan alpha yang ditetapkan lebih tinggi dibanding Shell dan Aneka Kimia Raya. Sayangnya, kemenangan perusahaan asing menyebabkan uang dari Indonesia berpindah ke negara lain. Berbeda dengan perusahaan dalam negeri, uangnya masuk ke kantong sendiri.

"Tidak masalah PLN ingin harga BBM lebih murah. Pertamina ingin ambil keuntungan. Belum tentu Shell dan Aneka Kimia Raya yang menang dalam tender memiliki kinerja baik," katanya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PT PLN Persero, Ahmad Daryoko menyatakan, pihaknya merekomendasikan pemerintah untuk kembali pada acuan UUD 1945 dan Pancasila yang berorientasi kerakyatan. Jangan dahulukan untung rugi. "Itu hanya *multiplier effect* setelah kita memperkokoh SDA dan SDM. Dalam kondisi seperti ini, yang harus bertanggung jawab adalah Menteri ESDM dan Menteri Negara BUMN," jelas Ahmad. [IGK/N-6]

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

Mahasiswa & Warga Gelar Aksi Tutup Mulut

SUMBER, (PR).-

Puluhan mahasiswa dan warga Ds. Kanci, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon, menggelar aksi tutup mulut di jalur utama pantura, Kamis (28/2) siang. Mereka menolak pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), karena dikhawatirkan akan menimbulkan hujan asam yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar.

"PLTU menggunakan bahan bakar batu bara yang bisa menimbulkan hujan asam. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Akan timbul banyak penyakit mematikan bagi masyarakat sekitar PLTU," tandas Aan (23), koordinator lapangan (korlap) pengunjuk rasa.

Dengan mengatasnamakan "Rapel" (Rakyat Penyelamat Lingkungan), puluhan maha-

siswa dan warga Kanci menutup mulut dengan lakban. Seraya membentangkan sejumlah poster penolakan, mereka juga tiduran di bahu jalan jalur utama pantura, di depan pintu masuk menuju PLTU di Kanci, sehingga lalu lintas sempat terganggu.

Dalam pernyataannya, Rapel menilai, PLTU akan sangat mengganggu lingkungan dan aktifitas masyarakat. Selain dikhawatirkan menimbulkan pencemaran karena hujan asam, rentetan keberadaan PLTU juga berdampak pada pemanasan global (*global warming*).

Aji Nugroho, dari PT CEP (Cirebon Elektrik Power) yang membangun PLTU, menuturkan, soal Amdal sudah diajukan. Hanya, sampai sekarang belum keluar ijin atau rekomendasinya dari Pemprov Jabar. (A-93)***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2008

90% Pelanggan Listrik Akan Terkena Disinsentif

Mereka Pelanggan Listrik Rumah Tangga

JAKARTA, (PR).-

Lebih dari 90 persen pelanggan listrik golongan rumah tangga berpotensi terkena disinsentif dalam program penghematan yang rencananya dimulai Maret 2008. Disinsentif itu berupa tambahan biaya rekening yang harus dibayar pada bulan berikutnya.

Berdasarkan data PT PLN (Persero) di Jakarta, Kamis (28/2), dari 23,231 juta pelanggan di sistem kelistrikan Jawa dan Bali, hanya 12.116 atau 0,1 persen pelanggan rumah tangga yang kemungkinan mendapat insentif.

Pelanggan rumah tangga tersebut merupakan golongan R2 (>2.200-6.600 VA) dan R3 (>6.600 VA) di Jawa-Bali. Se-

mentara, pelanggan rumah tangga kelas R1 dari 450 VA sampai 2.200 VA akan terkena tarif lebih mahal dibandingkan sebelumnya.

Melalui skema penghematan tersebut, pelanggan akan mendapat insentif apabila berhemat sama atau lebih besar dari 20 persen dari pemakaian listrik nasional tahun 2007. Jika pelanggan menggunakan listrik lebih dari 80 persen rata-rata nasional, akan dikenakan tarif disinsentif.

Formula pemberian insentif adalah 20 persen dikalikan selisih pemakaian rata-rata nasional dengan pemakaian pelanggan dikalikan tarif listrik. Formula disinsentif adalah 1,6 dikalikan selisih pemakaian

pelanggan dengan 80 persen pemakaian rata-rata nasional dikalikan tarif listrik.

Data PLN untuk pemakaian listrik rata-rata nasional tahun 2007 adalah R1 - 450 VA sebesar 75 kWh, R1 - 900 VA sebesar 115 kWh, R1 - 1.300 VA sebesar 201 kWh, R1 - 2.200 VA sebesar 358 kWh, R2 sebesar 650 kWh, dan R3 sebesar 1.767 kWh.

PLN memperkirakan apabila pelanggan berhemat sebesar 20 persen, akan terdapat penghematan BBM 3,732 juta kiloliter per tahun atau setara dengan Rp 18,66 triliun.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi J. Purwono mengatakan, program insentif dan disinsentif merupakan upaya

memaksa pelanggan menghemat pemakaian listriknya. "Kami memang memaksa pelanggan berhemat sebab pemakaian listrik sudah terlalu boros," katanya.

Tak perlu diterapkan

Menurut Purwono, program insentif dan disinsentif bukan merupakan bentuk lain kenaikan tarif listrik sebab tambahan rekening listrik hanya dikenakan pada pelanggan yang boros. Bagi pelanggan yang berhemat malah mendapat pengurangan tarif. "Artinya, pemerintah memberikan pilihan. Sementara, kalau kenaikan tarif, pelanggan tidak punya pilihan, mau hemat atau boros tetap tarifnya naik," katanya. (A-78)***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOG
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2008

Bank Jabar Melayani Pembayaran Listrik

BANDUNG, (PR).-

Sebanyak 51 unit anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Jabar Banten yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, sudah bisa melayani para pelanggan PLN dalam membayar rekening listrik. Pembayaran melalui ATM semakin memudahkan dalam pelayanan kepada para pelanggan listrik.

Direktur Utama PT Bank Jabar Banten H. Agus Ruswendi, Rabu (27/2) di Bandung mengatakan, sejak Selasa (26/2), pihaknya secara resmi menjadi tempat pembayaran rekening listrik pelanggan PLN yang ada di Jabar dan Banten. "Perjanjian kerja sama dengan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten telah kita tanda tangani," ujarnya.

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Bank Jabar Banten dan PT PLN DJBB telah dilakukan Selasa (26/2) di Bandung. Dari pihak Bank Jabar Banten penandatanganan dilakukan oleh Agus Ruswendi, sedangkan dari PLN DJBB oleh GM Mur-

taqi Syamsuddin.

Dengan kerja sama itu, pelanggan PLN bisa menggunakan seluruh fasilitas ATM Bank Jabar Banten. "Ini tentu lebih memudahkan dan memperpendek waktu pelanggan PLN dalam membayar rekening listrik. Mereka cukup datang ke ATM Bank Jabar Banten, dan sudah bisa bertransaksi dalam pembayaran rekening listrik," kata Agus. Pada tahun 2008, Bank Jabar Banten berencana menambah 152 unit ATM.

Agus menilai, pelayanan pembayaran rekening listrik bukan saja melalui ATM yang ada, tapi juga bisa melalui *teller* kantor Bank Jabar Banten dan *channel-channel* lainnya. "Artinya, semua kantor cabang yang ada, sudah siap melayani pembayaran rekening," ucapnya.

Selain itu, Bank Jabar Banten juga siap untuk membina mitra dari unsur masyarakat yang berminat membuka loket pembayaran melalui alat yang disebut *electronic data capture* (EDC). (A-134)***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

VIEW

Pemerintah Paksa Pelanggan Listrik Berhemat

Oleh: J Purwono

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM

Pemerintah menyatakan program insentif dan disinsentif merupakan upaya memaksa pelanggan menghemat pemakaian listriknya. Pemerintah melihat pemakaian listrik pelanggan sudah terlalu boros. Kami memang memaksa pelanggan berhemat sebab pemakaian listrik sudah terlalu boros. Lebih dari 90 persen pelanggan listrik golongan rumah tangga berpotensi terkena disinsentif berupa tambahan biaya rekening dalam program penghematan listrik yang direncanakan mulai Maret 2008.

Data PT PLN (Persero) menunjukkan, dari total pelanggan listrik rumah tangga sebesar 34,104 juta, sebanyak 30,922 juta atau 90,67 persen di antaranya mengkonsumsi listrik di atas batas terendah tidak terkena disinsentif yakni 80 persen rata-rata pemakaian listrik nasional. Hanya sebanyak 3,182 juta pelanggan rumah tangga atau 9,33 persen yang kemungkinan mendapat insentif berupa pengurangan biaya rekening listrik.

Data tersebut juga menunjukkan, dari 23,231 juta pelanggan di sistem kelistrikan Jawa dan Bali, hanya 12.116 atau 0,1 persen pelanggan rumah tangga yang kemungkinan mendapat insentif. Pelanggan rumah tangga tersebut merupakan golongan R2 (>2.200-6.600 VA) dan R3 (>6.600 VA) di Jawa-Bali. Sedangkan pelanggan rumah tangga kelas R1 dari 450 VA sampai 2.200 VA di data tersebut akan terkena tarif lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Untuk wilayah di luar Jawa dan Bali, dari 10,873 juta pelanggan rumah tangga, sebanyak 3,16 juta atau 29,1 persen berpotensi mendapatkan pengurangan biaya rekening. Lebih khusus lagi, hampir seluruh pelanggan di semua golongan wilayah distribusi Nusa Tenggara Timur berpotensi mendapat insentif tarif.

Menurut saya, program insentif dan disinsentif bukan merupakan bentuk lain kenaikan tarif listrik. Sebab, tambahan rekening listrik hanya dikenakan pada pelanggan yang boros. Bagi pelanggan yang berhemat malah mendapat pengurangan tarif.

Artinya, pemerintah memberikan pilihan. Sementara, kalau kenaikan tarif, pelanggan tidak punya pilihan, mau hemat atau boros tetap tarifnya naik,"katanya. Pemerintah tidak perlu meminta persetujuan DPR untuk melaksanakan program insentif dan disinsentif. Keputusan program insentif dan disinsentif akan dikeluarkan Direksi PLN.

Program sudah disiapkan sejak dua tahun lalu dan pemerintah sudah mengantisipasi dampak sosialnya. Pemerintah akan menerapkan program penghematan pemakaian listrik melalui penerapan tarif insentif dan disinsentif pada rekening pelanggan bulan Maret yang ditagihkan April 2008.

Melalui skema tersebut, pelanggan akan mendapat insentif apabila berhemat sama atau lebih besar dari 20 persen dari pemakaian listrik nasional tahun 2007. Namun, jika pelanggan menggunakan listrik lebih dari 80 persen rata-rata nasional, maka akan dikenakan tarif disinsentif. Formula pemberian insentif adalah 20 persen dikalikan selisih pemakaian rata-rata nasional dengan pemakaian pelanggan dikalikan tarif listrik. Sedang formula disinsentif adalah 1,6 dikalikan selisih pemakaian pelanggan dengan 80 persen pemakaian rata-rata nasional dikalikan tarif listrik.

PLN memperkirakan apabila pelanggan berhemat sebesar 20 persen maka akan terdapat penghematan BBM sebanyak 3,732 juta kiloliter per tahun atau setara dengan Rp18,66 triliun. ●

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 **29** 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2008

PLN Sumatra Alami Kerugian Rp 850 Miliar

Palembang - PT. PLN (Persero) wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu (WS2JB) pada tahun 2008 diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp850 miliar atau lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2007 lalu yang hanya Rp650 miliar. Laba negatif PT. PLN pada tahun 2008 sebesar Rp850 miliar dan angka itu lebih tinggi dari tahun 2007 yang hanya sekitar Rp650 miliar, kata GM PT.PLN (Persero) WS2JB, Dodoh Rahmat di Palembang, Kamis.

Menurut dia, berdasarkan hasil audit BPK, kerugian itu lebih tinggi, karena setiap kenaikan satu persen volume penjualan tenaga listrik akan menambah kerugian sebesar 227,47 miliar, kalau kenaikannya mencapai lima persen berarti sekitar Rp1 triliun. "Itulah kewajiban kami supaya pertumbuhan tetap naik, kalau bisa diatas lima persen," katanya.

Ia mengatakan, pada 2006 lalu kerugian yang diderita perusahaan listrik untuk WS2JB mencapai Rp1 triliun lebih dan di tahun 2007 memang mengalami penurunan yang signifikan, karena adanya pengoperasian pembangkit yang non BBM.

Selain itu pengoperasian pembangkit listrik yang kecil seperti PLTG Prabumulih dan Musi II, ujarnya. Pada Maret 2008 nanti juga bakal beroperasi PLTG Sako sebesar 12 MW, paparnya.

Lebih lanjut ia menyatakan, di Sumsel saat ini sekitar 2.740 jumlah desa yang belum dialiri listrik sebanyak 659 desa.

Untuk mengaliri listrik semua desa di Sumsel itu butuh waktu sekitar 18 tahun lagi, karena setiap tahunnya hanya dianggarkan 35 desa yang dananya berasal dari APBN, tambahnya.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 **29** 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Inefisiensi Biaya Pembangkit Listrik **Segera Negosiasi Ulang Penyediaan Gas**

GONJANG-ganjing yang terjadi pada pengadaan listrik nasional diprediksi berlangsung lebih parah. Ditambah lagi jika tidak ditempuh langkah berani melakukan negosiasi ulang terkait dengan pengadaan gas nasional.

"Pemerintah mesti bersikap visioner. Jika kebijakan ini diteruskan maka ujung-ujungnya yang memikul semua *cost* adalah konsumen. Secara keseluruhan juga tidak menguntungkan membangkitkan perekonomian dalam negeri," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Ahmad Daryoko di Jakarta.

Menurutnya, akibat kebijakan mematok pengadaan gas sebesar 25 persen untuk dalam negeri, terjadi inefisiensi pada biaya pembangkit listrik. Selama ini sendiri telah terjadi kekurangan pasokan gas untuk PLTU Dual Firing yang berkapasitas 7.500 MW.

Semua itu terjadi, tuding Ahmad, akibat kebijakan pemerintah tentang Migas sebagaimana tercantum pada pasal 22 UU Nomor 22/2001 tentang Migas yang memberikan kuota untuk gas

dalam negeri hanya sebesar 25 persen. "Akibat kebijakan diatas, terjadi inefisiensi pada sisi pembangkit sebesar Rp 30 triliun," jelasnya.

Jika PLTU Dual Firing dioperasikan dengan gas, Daryoko menambahkan, hal itu hanya membutuhkan biaya sebesar Rp 7 triliun. Padahal, saat ini biaya operasi pembangkitan listrik dilakukan menggunakan BBM sehingga menghabiskan biaya Rp 37 triliun.

Apalagi, lanjutnya, subsidi BBM untuk operasi pembangkit dipotong pemerintah sebesar Rp 10 triliun, sehingga dengan tidak adanya gas serta pemotongan subsidi, maka terjadi gangguan operasional pada pembangkit listrik.

Untuk mengatasi itu, Ahmad mengimbau dilakukan pembuatkan konstruksi break water (pemisah gelombang) pada setiap PLTU sehingga dapat membantu kapal pengangkut batabara pada saat *dumping* di dermaga PLTU.

Di bagian lain, Ahmad juga mengungkapkan, Serikat Pekerja PLN menolak skenario memecah-mecah PT PLN. ■ FN

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN **FEB** MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 **29** 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Pelanggan Listrik Dipaksa Berhemat

JAKARTA- Program insentif dan disinsentif merupakan upaya memaksa pelanggan menghemat pemakaian listrik, karena saat ini dinilai sudah terlalu boros. Program pengamatan listrik ini akan mengenakan diskon 20% bagi pelanggan yang bisa berhemat, dan disinsentif atau denda 60% bagi pelanggan yang boros.

"Dengan penenaan disinsentif yang lebih besar dari insentif, ini menjadi upaya pemerintah memaksa pelanggan untuk hemat listrik," ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM J Purwono di Jakarta, Kamis (28/2).

Direktur Niaga dan Pelayanan PLN Sunggu Anwar Aritonang memperkirakan apabila pelanggan berhemat sebesar 20% terdapat penghematan BBM sebanyak 3,732 juta kiloliter per tahun atau setara dengan Rp 18,66 triliun.

Sebelumnya diberitakan,

pemerintah berniat memberlakukan program insentif disinsentif mulai Maret 2008 dan tercantum pada tagihan listrik konsumen April 2008. Program ini ditargetkan dapat menekan 20% rata-rata konsumsi listrik tahun lalu. Insentif maupun disinsentif dikenakan pada selisih realisasi konsumsi listrik dengan rata-rata yang ditetapkan pemerintah berdasarkan data tahun lalu.

Lebih dari 90% pelanggan listrik golongan rumah tangga berpotensi terkena disinsentif berupa tambahan biaya rekening dalam program penghematan listrik ini. Data PT PLN menunjukkan, dari total pelanggan listrik rumah tangga sebesar 34,104 juta, sebanyak 30,922 juta atau 90,67% di antaranya mengonsumsi listrik di atas batas terendah tidak terkena disinsentif, yaitu 80% rata-rata pemakaian nasional.

Hanya sebanyak 3,182 juta pelanggan rumah tangga atau 9,33% yang kemungkinan mendapat insentif berupa pengurangan biaya rekening listrik.

Data tersebut juga menunjukkan, dari 23,231 juta pelanggan di sistem kelistrikan Jawa dan Bali, hanya 12.116 atau 0,1% pelanggan rumah tangga yang kemungkinan mendapat insentif.

YLKI Menolak

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Barat Dahnil Aswad menilai penerapan tarif listrik insentif dan disinsentif bagi PT PLN terlalu terburu-buru di tengah pukulan ekonomi masyarakat saat ini. Dia menilai, rencana pemberlakuan tarif insentif dan disinsentif belum tepat, karena pelanggan belum mengetahui dan memahami secara utuh pola tarif insentif dan disinsentif itu. (pya/ant)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

Program Hemat Listrik Harus Transparan

Pemerintah terus menggalai strategi penghematan energi, dengan sasaran utama memangkas subsidi. Setelah hiruk-pikuk rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan kartu pintar (*smart card*)—yang ternyata ditunda—kini pemerintah berniat membatasi konsumsi listrik.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudahancang-ancang menyiapkan kebijakan insentif dan disinsentif bagi seluruh konsumen listrik di Indonesia. Program ini akan dimulai Maret 2008.

PLN akan memberikan insentif kepada konsumen yang pemakaian bulannya lebih rendah dari rata-rata pemakaian bulanan nasional setahun sebelumnya. Besarnya insentif adalah 20% dari selisih konsumsi listrik yang bisa dihemat dikalikan tarif.

Sebaliknya, konsumen yang boros dan melebihi rata-rata konsumsi nasional, akan dikenai disinsentif. Besarnya adalah 60% dari kelebihan konsumsi dikalikan tarif.

Menurut kalkulasi PLN, program ini diperkirakan dapat menghemat pemakaian solar untuk pembangkit sebesar 3,372 juta liter atau setara Rp 18,66 triliun per tahun. Jumlah efisiensi yang signifikan, mengingat subsidi listrik tahun ini mencapai Rp 65 triliun. Sementara itu, subsidi BBM lebih besar lagi, Rp 102 triliun.

Tidak seperti rencana program kartu pintar BBM yang heboh dan mendapat resistensi banyak pihak, program hemat listrik ini relatif sepi dari kritik, kecuali Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Implementasi program ini

tergolong mendadak, kendati telah diwacanakan akhir tahun lalu.

Kita setuju bahwa program hemat energi, baik listrik maupun BBM, harus secara disiplin dimulai dari sekarang. Kita tak boleh lagi seandainya mengonsumsi sumber-sumber energi yang mayoritas tidak terbarukan (*non-renewable*) dan harganya cenderung naik. Sebab, tingginya harga energi dunia, terutama minyak mentah, berakibat pada pembengkakan subsidi BBM, listrik, dan lainnya.

Selama ini Indonesia dikenal sebagai bangsa boros energi. Ini tercermin pada tingginya elastisitas energi, sebuah parameter yang

menggambarkan kebutuhan energi untuk menghasilkan satu persen produk domestik bruto (PDB). Makin tinggi rasio elastisitas, berarti makin boros. Di Indonesia, rasio elastisitas energi mencapai 1,85%, padahal beberapa negara tetangga hanya 0,5-1%.

Perilaku boros energi bisa terbaca pada data yang ada di PLN. Dari 34,1 juta rumah tangga pelanggan listrik, sekitar 90% atau 30 juta adalah pelanggan yang terbiasa mengonsumsi listrik di atas batas penghematan yang disyaratkan PLN.

Itu sebabnya, setiap program hemat energi dan konservasi energi patut didukung. Namun harus dengan beberapa catatan. Seperti pada program insentif-disinsentif listrik ini, sepertinya pemerintah dan PLN kurang sosialisasi. Mestinya konsumen mendapat penjelasan memadai, guna menghindari protes dan keributan di kemudian hari.

Selain itu, PLN harus transparan. Rumus insentif dan disinsentif yang rumit akan sulit dipahami

para konsumen, utamanya golongan menengah-bawah. Belum lagi mereka yang membayar tagihan listrik tidak lewat PLN, melainkan menggunakan jasa bank, baik lewat ATM maupun kartu kredit.

Konsumen yang menggunakan pembayaran model ini tidak akan mendapat rincian insentif-disinsentif karena tidak memperoleh rekening tagihan. Hal itu tentu berpotensi menimbulkan gejolak. Apalagi mayoritas konsumen cenderung mengonsumsi listrik berlebih, sehingga rawan terkena disinsentif.

Hal-hal teknis implementasi di lapangan itulah yang perlu diantisipasi PLN sejak dini, apalagi pelayanan PLN untuk hal-hal yang reguler saja selama ini relatif masih kurang.

Program hemat listrik ini tentu saja hanya satu dari skenario besar upaya penghematan energi besar di masa mendatang. Karena itu, program ini perlu dibarengi upaya lain. Dari internal PLN, perusahaan ini dinilai kurang efisien sehingga efisiensi menjadi tuntutan mutlak. *Losses* dan pencurian listrik juga masih marak sehingga perlu pembenahan.

Di luar itu, pemerintah perlu merancang kebijakan hemat energi nasional yang komprehensif dan menata ulang kebijakan energi nasional. □

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

Locals reject nuclear power project on Mount Muria

Suherdjoko

The Jakarta Post/Jepara

Up to 3,000 villagers staged a rally in Jepara, Central Java, Thursday to oppose the planned construction of a nuclear power plant on the regency's Mount Moria.

The protesters, mostly residents of Balong village in the Kembang sub-district, as well as students and activists, carried protest posters and banners.

They converged at a building in the middle of a sugar cane plantation which served as the National Atomic Energy Agency's Ujung Lemah Abang Nuclear Power Station Safety and Research observation facility.

They stopped at the building entrance and addressed the crowd on the risks associated with nuclear power and later worked together to form the foundation of a concrete wall.

"This is our fourth protest since last year," rally coordinator Firdaus Rahmadi told *The Jakarta Post* at the site on Thursday.

"We only sealed the building symbolically in the three earlier demonstrations, but now we are really sealing it with a concrete wall."

He said despite the protests, the government had not been decisive on the construction of the power station, which he said it had planned since the 1980s.

"The presence of the office, built in 1995, indicates that the government will resume with its plan," Firdaus said.

"We have decided to oppose it due to the risks it would pose to our lives.

"We also demand the central government to revoke the law pertaining to nuclear energy enacted in 1997," he said.

The idea on the nuclear power plant came from former vice President B.J. Habibie when he was minister for research and technology in the 1990s and it won support from former president Soeharto.

The plan was closely linked with the construction of the large Kedung Ombo dam, but the project was stopped after it met with strong opposition both at home

and overseas.

Bricklayers and residents worked hard to erect the wall which measured around eight meters in length.

Trucks carrying sand, bricks, cement and water were going back and forth at the site, right in front of security guards.

Mufid Busyairi, a legislator of the National Awakening Party (PKB) and member of the agriculture and forestry affairs commission at the House of Representatives, was picked to lay the wall's corner stone, which was followed-up by Balong village officials and residents.

"I purposely came here to observe the public's aspirations firsthand," Mufid said.

A number of House members have reportedly decided to oppose the planned nuclear power station.

Those who come from the Jepara electoral district have long-since opposed it.

"But the House is split over the plan," Mufid said.

Balong village chief Suwanto was compelled to engage in the brick-laying activity because residents urged all village officials to take part.

"I'm in the middle. I can only follow the wishes of the people," Suwanto said.

"But on the other hand I also wish they could comply with the existing law.

"I'm grateful they have never resorted to anarchy during the series of protests so far," he said.

A philosophy student at the Gadjah Mada University in Yogyakarta, Darul Hasyimfath, said he was surprised to see House members at the protest in favor with the people.

"Don't be a hero in this issue," he said,

"Even we students, who had earlier informed people of the hazards of nuclear energy, feel that we haven't done anything special.

"The local residents are actually the champions.

"They fight for the cause.

"The House members are just politicians.

"Now they may likely say they oppose the program, but they will be in favor later when the political course shifts," Darul said.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 23

TAHUN 2008

MENOLAK PLTN

Ribuan Warga Balong Segel Kantor Batan

JEPARA, KOMPAS — Sekitar 2.000 warga Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menyegel Kantor Pemantauan Keselamatan dan Penelitian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Ujung Lemah Abang milik Badan Tenaga Nuklir Nasional. Warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat dan Mahasiswa Tolak PLTN atau Kraton Balong itu menutup pintu masuk kantor dengan membuat tembok setinggi 1,5 meter.

Bangunan kantor dengan papan nama yang juga telah ditutup cat putih oleh warga setempat sejak setahun lalu itu kemarin dalam kondisi kosong. Bahkan, seorang petugas satuan pengamanan yang biasanya berjaga juga tidak di tempat.

Juru bicara Kraton Balong, M Firdaus Ahmadi, Kamis (28/2),

mengatakan, unjuk rasa dan penyegehan kantor riset Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) itu merupakan penegasan kembali penolakan warga Balong atas pembangunan PLTN. Aksi itu juga merupakan penolakan terhadap Undang-Undang Ketenaganukliran Tahun 1997.

Ia menilai, selama ini pemerintah tidak pernah mengajak bicara warga Balong. Keputusan pembangunan selalu berasal dari atas sehingga warga hanya menjadi pendengar dan penerima keputusan.

Pendapat itu dipertegas juru bicara Poros Muria Madura, Darul Hasyim Fath. Menurut dia, pemerintah tak pernah melibatkan warga dalam pengambilan kebijakan pembangunan PLTN.

Dalam unjuk rasa itu, Kraton Balong mengajukan beberapa

tuntutan. Mereka menolak pembangunan PLTN dan infiltrasi modal yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta degradasi lingkungan. Warga meminta aktivitas riset Batan di Ujung Lemah Abang dihentikan karena mengakibatkan keresahan dan mengancam kehidupan warga. Kraton Balong meminta pemerintah mengganti UU Ketenaganukliran dengan UU Antinuklir.

Sebelum menuju kantor riset Batan, massa ke kantor kelurahan untuk meminta agar perangkat Desa Balong turut menyegel kantor riset Batan.

Perangkat desa, perwakilan warga, mahasiswa, serta anggota Komisi IV DPR, Mufid A Busyairi, mengawali pembangunan tembok setinggi 1,5 meter. Tembok itu dibangun di depan pintu gerbang kantor riset Batan. (HEN)